

Implementasi Politik Etis Terhadap Pendidikan Pribumi di MULO Surabaya 1914-1942

Syahvier Sukmana Basyasah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Riwayat artikel:

Received 10 April 2026

Revised 15 April 2026

Accepted 20 April 2026

Available online 30 April 2026

Keywords :

Ethical Policy, MULO Surabaya,
Indigenous Education.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Ethical Policy toward indigenous education at Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) in Surabaya during 1914–1942. It focuses on the selection process of indigenous students, the implementation of the educational system, and its impact on indigenous society. This research employs a qualitative historical method through heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data were collected from colonial archives, Dutch-language newspapers, official government documents, and relevant literature. The findings show that access to MULO remained highly selective through entrance examinations, academic ranking, and Dutch language proficiency requirements. The implementation of the Ethical Policy was reflected in the establishment of a modern educational system designed to meet the administrative needs of the colonial government. At the same time, MULO provided opportunities for social mobility by enabling indigenous graduates to work as teachers, administrative officers, and office employees. Moreover, the institution contributed to the emergence of an educated indigenous elite with growing social and political awareness, demonstrating that MULO

functioned not only as an instrument of colonial rule but also as a space that indirectly fostered Indonesian nationalism.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Politik Etis terhadap pendidikan pribumi di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) Surabaya pada periode 1914–1942. Penelitian ini berfokus pada proses seleksi pelajar pribumi, penyelenggaraan sistem pendidikan, serta dampaknya terhadap masyarakat pribumi. Penelitian ini menggunakan metode sejarah kualitatif melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data diperoleh dari arsip kolonial, surat kabar berbahasa Belanda, dokumen resmi pemerintah, serta berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses menuju MULO tetap bersifat sangat selektif melalui ujian masuk, sistem pemeringkatan akademik, dan persyaratan penguasaan bahasa Belanda. Implementasi Politik Etis tercermin dalam penyelenggaraan sistem pendidikan modern yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintah kolonial. Di sisi lain, MULO memberikan peluang mobilitas sosial dengan membuka kesempatan bagi lulusan pribumi untuk bekerja sebagai guru, pegawai administrasi, dan tenaga perkantoran. Selain itu, lembaga ini turut berkontribusi terhadap lahirnya kelompok elite pribumi terdidik yang memiliki kesadaran sosial dan politik yang semakin berkembang. Hal tersebut menunjukkan bahwa MULO tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kekuasaan kolonial, tetapi juga menjadi ruang yang secara tidak langsung mendorong tumbuhnya nasionalisme Indonesia.

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi salah satu sektor yang memperoleh perhatian utama dalam pelaksanaan Politik Etis yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda sejak awal abad ke-20. Kebijakan tersebut lahir sebagai respons atas kritik terhadap sistem eksploitasi kolonial pada masa Tanam Paksa sekaligus sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi melalui program irigasi, emigrasi, dan edukasi. Di antara ketiga program tersebut, sektor pendidikan dipandang paling strategis karena mampu menyediakan tenaga kerja terdidik yang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan birokrasi kolonial. Atas dasar itu, pemerintah

Hindia Belanda memperluas penyelenggaraan pendidikan bergaya Barat melalui pendirian berbagai jenis sekolah sesuai dengan stratifikasi sosial masyarakat. Meskipun demikian, perluasan pendidikan tersebut tidak sepenuhnya ditujukan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat pribumi, melainkan tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan dan pembangunan ekonomi kolonial. Akibatnya, akses terhadap pendidikan modern masih dibatasi oleh status sosial, kemampuan ekonomi, serta penguasaan bahasa Belanda sehingga hanya sebagian kecil masyarakat pribumi yang dapat menikmati pendidikan Barat.¹

Surabaya merupakan salah satu kota yang mengalami perkembangan paling pesat sebagai pusat pelabuhan, perdagangan, industri, dan administrasi pemerintahan di Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Posisi strategis tersebut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi, pertumbuhan penduduk, serta kebutuhan pemerintah kolonial akan tenaga administrasi yang memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan menguasai bahasa Belanda. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah kolonial memperluas penyelenggaraan pendidikan formal bergaya Barat melalui pendirian berbagai jenis sekolah berdasarkan klasifikasi penduduk, seperti *Europeesche Lagere School* (ELS), *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS), *Hollandsch-Chineesche School* (HCS), hingga *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) sebagai jenjang pendidikan menengah. Kehadiran MULO di Surabaya menunjukkan bahwa implementasi Politik Etis tidak hanya diwujudkan melalui pendirian lembaga pendidikan, tetapi juga melalui pembentukan sistem pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan administrasi kolonial di tingkat lokal.²

Dalam sistem pendidikan kolonial, *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) memiliki kedudukan penting sebagai jenjang lanjutan bagi lulusan sekolah dasar berbahasa Belanda sekaligus menjadi jalur menuju pendidikan tinggi maupun dunia kerja. Meskipun demikian, kesempatan masyarakat pribumi untuk memasuki MULO tetap berlangsung secara selektif melalui persyaratan akademik, ujian masuk, sistem pemeringkatan, serta penguasaan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar pembelajaran. Kurikulum yang diterapkan juga lebih menekankan penguasaan ilmu pengetahuan praktis, kedisiplinan, dan keterampilan administrasi yang dibutuhkan dalam birokrasi kolonial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Politik Etis di bidang pendidikan tidak sepenuhnya diarahkan untuk memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat pribumi, melainkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi tingkat menengah. Ironisnya, sistem pendidikan tersebut justru membuka peluang mobilitas sosial bagi sebagian kecil masyarakat pribumi dan mendorong lahirnya kelompok elite terdidik yang memiliki kesadaran sosial dan politik yang semakin berkembang³.

Berbagai penelitian mengenai Politik Etis dan pendidikan kolonial telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan perkembangan kebijakan pendidikan di Hindia Belanda. Kajian tersebut umumnya berfokus pada implementasi Politik Etis dalam konteks yang lebih luas, perkembangan sistem pendidikan kolonial, maupun dampaknya terhadap masyarakat pribumi secara umum. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Politik Etis pada satu lembaga pendidikan menengah, terutama MULO Surabaya, masih relatif terbatas. Akibatnya, mekanisme seleksi peserta didik pribumi, penyelenggaraan sistem pendidikan, serta dampaknya terhadap pembentukan kelompok elite pribumi terdidik di tingkat lokal belum

¹ Alifia Nurhusna Afandi, Aprilia Iva Swastika, dan Ervin Yunus Evendi, "Pendidikan pada Masa Pemerintah Kolonial di Hindia Belanda Tahun 1900–1930," *Jurnal Artefak* 7, no. 1 (2020): 20–29.

² D. R. Galih, "Pusat Pendidikan di Surabaya: Penerapan Politik Etis 1911–1930," *Avatara: E-Journal Pendidikan Sejarah* 6, no. 2 (2018): 140–151.

³ D. P. Sari, "Kweekschool, Politik Etis, dan Transformasi Pendidikan Guru Pribumi di Hindia Belanda," *Sejarah Citra Lekha* 6, no. 2 (2021): 87–102.

banyak mendapat perhatian. Kekosongan kajian tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang mampu menjelaskan bagaimana kebijakan pendidikan kolonial diimplementasikan dalam praktik sehari-hari pada tingkat institusi pendidikan.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Politik Etis terhadap pendidikan pribumi di MULO Surabaya pada periode 1914–1942 dengan memfokuskan kajian pada proses seleksi peserta didik, penyelenggaraan sistem pendidikan, serta dampaknya terhadap mobilitas sosial dan pembentukan kelompok elite pribumi terdidik. Penelitian ini menggunakan metode sejarah melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi dengan memanfaatkan arsip kolonial, surat kabar berbahasa Belanda, dokumen resmi pemerintah, serta berbagai literatur pendukung. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas Politik Etis pada tingkat yang lebih luas, penelitian ini menyoroti implementasinya di MULO Surabaya sehingga mengungkap bagaimana praktik pendidikan kolonial secara bersamaan mendukung administrasi kolonial sekaligus mendorong lahirnya kelompok elite pribumi terdidik. Temuan tersebut diharapkan dapat memperkaya historiografi pendidikan kolonial dengan memberikan perspektif yang lebih spesifik mengenai implementasi Politik Etis pada lembaga pendidikan menengah di Hindia Belanda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah sebagaimana dikemukakan oleh Kuntowijoyo yang meliputi empat tahapan, yaitu heuristik, verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi.¹ Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan implementasi Politik Etis serta perkembangan MULO Surabaya. Sumber primer diperoleh melalui penelusuran arsip kolonial pada Delpher berupa surat kabar *De Indische Courant*, *Soerabaijasch Handelsblad*, *De Locomotief*, dan *Nieuwe Courant*. Penelitian ini juga memanfaatkan dokumen resmi pemerintah kolonial, seperti *Algemeen Verslag van het Onderwijs in Nederlandsch-Indië*, *Algemeen Verslag Inlandsch Onderwijs in Nederlandsch-Indië*, *Staatsblad van Nederlandsch-Indië*, arsip Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur, serta dokumen pendukung berupa rapor dan ijazah MULO. Adapun sumber sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, skripsi, dan jurnal yang relevan dengan Politik Etis, pendidikan kolonial, serta sejarah Kota Surabaya.

Tahap verifikasi dilakukan melalui kritik eksternal dan kritik internal terhadap seluruh sumber yang telah dikumpulkan. Kritik eksternal bertujuan menguji autentisitas sumber berdasarkan asal-usul, waktu penerbitan, dan karakteristik dokumen, sedangkan kritik internal dilakukan untuk menilai kredibilitas isi sumber melalui perbandingan antararsip, surat kabar, dan literatur. Tahap ini penting mengingat sebagian besar sumber primer berasal dari pemerintah kolonial sehingga diperlukan pembacaan secara kritis guna meminimalkan bias kolonial.

Tahap interpretasi dilakukan dengan menghubungkan fakta-fakta sejarah yang telah diverifikasi untuk memperoleh pemahaman mengenai implementasi Politik Etis terhadap pendidikan pribumi di MULO Surabaya. Analisis difokuskan pada mekanisme seleksi peserta didik, penyelenggaraan sistem pendidikan, serta dampaknya terhadap mobilitas sosial masyarakat pribumi dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi Surabaya pada masa kolonial.

⁴ G. M. Prayudi dan D. Salindri, "Pendidikan pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda di Surabaya Tahun 1901–1942," *Publika Budaya* 1, no. 3 (2015): 20–34.

Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penyusunan hasil penelitian dalam bentuk tulisan sejarah yang disusun secara kronologis, sistematis, dan analitis. Tahapan ini bertujuan merekonstruksi implementasi Politik Etis terhadap pendidikan pribumi di MULO Surabaya selama periode 1914–1942 berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai sumber sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Politik Etis terhadap pendidikan pribumi di MULO Surabaya tidak hanya diwujudkan melalui perluasan lembaga pendidikan, tetapi juga melalui pembentukan sistem pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintah kolonial. Surabaya yang berkembang sebagai pusat perdagangan, pelabuhan, industri, dan pemerintahan di kawasan timur Pulau Jawa mengalami pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang sangat pesat pada awal abad ke-20. Perkembangan tersebut meningkatkan kebutuhan pemerintah Hindia Belanda terhadap tenaga administrasi yang memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, serta menguasai bahasa Belanda. Oleh karena itu, perluasan pendidikan Barat menjadi salah satu bentuk implementasi Politik Etis yang diarahkan untuk mendukung keberlangsungan birokrasi kolonial.⁵

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui pendirian berbagai jenis sekolah berdasarkan stratifikasi masyarakat, mulai dari *Europeesche Lagere School* (ELS), *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS), *Hollandsch-Chineesche School* (HCS), hingga *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) sebagai jenjang pendidikan menengah. Berdasarkan *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* Nomor 446 Tahun 1914, pemerintah kolonial menetapkan penyelenggaraan MULO sebagai sekolah lanjutan yang bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di Surabaya, MULO mulai beroperasi pada tahun 1916 di kawasan Praban dan kemudian berkembang dengan pembukaan MULO Ketabang seiring meningkatnya jumlah peserta didik. Bertambahnya sekolah menengah tersebut menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan di Surabaya berkaitan erat dengan meningkatnya kebutuhan birokrasi kolonial terhadap tenaga kerja terdidik.⁶ Perluasan MULO di Surabaya tidak hanya ditandai dengan bertambahnya jumlah sekolah, tetapi juga meningkatnya jumlah peserta didik dari kalangan pribumi yang berhasil memenuhi persyaratan masuk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Politik Etis mulai membuka kesempatan pendidikan menengah bagi masyarakat pribumi, meskipun akses tersebut masih terbatas pada kelompok yang mampu memenuhi standar akademik dan administrasi yang ditetapkan pemerintah kolonial. Dengan demikian, pendirian MULO mencerminkan implementasi Politik Etis yang bersifat selektif, yaitu memperluas akses pendidikan tanpa menghapus pembatasan sosial yang telah diterapkan dalam sistem pendidikan kolonial.

Meskipun pemerintah kolonial memperluas akses pendidikan melalui pendirian MULO, kesempatan masyarakat pribumi untuk memperoleh pendidikan menengah tetap berlangsung secara terbatas. Arsip surat kabar kolonial menunjukkan bahwa penerimaan peserta didik dilakukan melalui pengumuman resmi yang memuat jadwal ujian masuk, persyaratan administrasi, serta ketentuan akademik yang harus dipenuhi calon siswa. Peserta didik diwajibkan berasal dari sekolah dasar berbahasa Belanda atau memiliki kemampuan akademik yang setara, kemudian mengikuti ujian seleksi yang diselenggarakan pemerintah kolonial. Selain itu, penguasaan bahasa Belanda menjadi syarat utama karena seluruh proses pembelajaran

⁵ Handinoto, *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870–1940* (Yogyakarta: ANDI, 1996), hlm. 107–114.

⁶ *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* No. 446 Tahun 1914; D. R. Galih, “Pusat Pendidikan di Surabaya: Penerapan Politik Etis 1911–1930,” *Avatara: E-Journal Pendidikan Sejarah* 6, no. 2 (2018): 140–151.

menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa pengantar. Sistem penerimaan tersebut memperlihatkan bahwa perluasan pendidikan pada masa Politik Etis tidak diikuti dengan pemberian akses yang setara bagi seluruh masyarakat pribumi, melainkan tetap dikendalikan melalui mekanisme seleksi yang ketat.⁷ Selain melalui proses seleksi, pelaksanaan pendidikan di MULO juga diarahkan untuk membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan akademik dan administratif sesuai kebutuhan pemerintah kolonial. Kurikulum menekankan penguasaan bahasa Belanda, ilmu pengetahuan umum, matematika, sejarah, geografi, serta berbagai mata pelajaran yang mendukung pembentukan tenaga administrasi tingkat menengah. Sistem pembelajaran tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan MULO tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan sumber daya manusia yang sesuai dengan kepentingan birokrasi kolonial.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Politik Etis pada bidang pendidikan mengandung paradoks. Di satu sisi, pemerintah Hindia Belanda membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat pribumi untuk memperoleh pendidikan modern melalui MULO. Di sisi lain, kesempatan tersebut tetap dibatasi melalui persyaratan akademik, kemampuan bahasa Belanda, dan proses seleksi yang dirancang untuk menyaring calon peserta didik sesuai kebutuhan pemerintah kolonial. Dengan demikian, pendidikan tidak semata-mata diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, tetapi juga menjadi instrumen dalam membentuk tenaga administrasi tingkat menengah yang mampu menunjang keberlangsungan birokrasi kolonial.⁸ Meskipun demikian, implementasi Politik Etis melalui penyelenggaraan MULO menghasilkan dampak yang melampaui tujuan awal pemerintah Hindia Belanda. Pendidikan yang diterima oleh sebagian pelajar pribumi membuka peluang mobilitas sosial melalui kesempatan bekerja sebagai guru, pegawai administrasi, maupun tenaga perkantoran. Selain meningkatkan kedudukan sosial dan ekonomi, pendidikan MULO juga memperluas wawasan intelektual para lulusannya sehingga mendorong tumbuhnya kelompok elite pribumi terdidik yang memiliki kesadaran sosial dan politik. Temuan ini menunjukkan bahwa MULO tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemerintah kolonial dalam memenuhi kebutuhan birokrasi, tetapi juga menjadi ruang yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap perkembangan nasionalisme Indonesia.

SIMPULAN

Implementasi Politik Etis terhadap pendidikan pribumi di MULO Surabaya pada periode 1914–1942 menunjukkan bahwa perluasan pendidikan kolonial tidak semata-mata bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, tetapi juga menjadi strategi pemerintah Hindia Belanda dalam memenuhi kebutuhan tenaga administrasi di tengah pesatnya perkembangan Surabaya sebagai pusat perdagangan, industri, dan pemerintahan. Pelaksanaan kebijakan tersebut diwujudkan melalui pendirian MULO serta penerapan sistem seleksi yang ketat berdasarkan kemampuan akademik, penguasaan bahasa Belanda, dan latar belakang pendidikan sehingga akses pendidikan menengah tetap bersifat terbatas. Meskipun demikian, penyelenggaraan pendidikan di MULO menghasilkan dampak yang melampaui tujuan awal pemerintah kolonial dengan membuka peluang mobilitas sosial bagi sebagian masyarakat pribumi serta mendorong lahirnya kelompok elite terdidik yang memiliki peran dalam perkembangan kesadaran kebangsaan. Temuan ini menunjukkan bahwa MULO tidak hanya

⁷ *MULO-Eindexamen, De Locomotief*, 30 Juni 1938; *Van belang voor den Inheemschen Middenstand, De Locomotief*, 4 Agustus 1939.

⁸ Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Bandung: Bumi Aksara, 1983), hlm. 124.

berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan Politik Etis dan kepentingan birokrasi kolonial, tetapi juga menjadi ruang yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap pembentukan intelektual pribumi dan perkembangan nasionalisme di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. N., Swastika, A. I., & Evendi, E. Y. (2020). *Pendidikan pada masa pemerintah kolonial di Hindia Belanda tahun 1900–1930*. Jurnal Artefak, 7(1), 20–29.
- Galih, D. R. (2018). *Pusat pendidikan di Surabaya: Penerapan Politik Etis 1911–1930*. Avatara: E-Journal Pendidikan Sejarah, 6(2), 140–151.
- Handinoto. (1996). *Perkembangan kota dan arsitektur kolonial Belanda di Surabaya 1870–1940*. Yogyakarta: ANDI.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nasution, S. (1983). *Sejarah pendidikan Indonesia*. Bandung: Bumi Aksara.
- Prayudi, G. M., & Salindri, D. (2015). *Pendidikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Surabaya tahun 1901–1942*. Publika Budaya, 1(3), 20–34.
- Sari, D. P. (2021). *Kweekschool, Politik Etis, dan transformasi pendidikan guru pribumi di Hindia Belanda*. Sejarah Citra Lekha, 6(2), 87–102.
- Algemeen Verslag van het Onderwijs in Nederlandsch-Indië, Eerste Deel: Tekst, 1916–1917*. (1918). Batavia: Departement van Onderwijs.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indië*. (1914). No. 446.
- MULO-Eindexamen*. (1938, 30 Juni). *De Locomotief*.
- Van belang voor den Inheemschen Middenstand*. (1939, 4 Agustus). *De Locomotief*.